BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pasca krisis moneter 1997 dan diikuti krisis politik pada 1998, Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara seolah-olah kesulitan untuk mengembalikan kondisi negara seperti semula. Perekonomian yang tidak kunjung membaik yang akhirnya berimbas kepada membangkaknya hutang negara dan pergantian pucuk pimpinan negara yang terlalu cepat semakin memperkeruh keadaan. Hal ini berimbas kepada status Indonesia diranah politik internasional. Dengan segala kondisi yang ada di Indonesia seperti itu ditambah isu Indonesia sebagai sarang teroris membuat *bargaining position* Indonesia melemah di mata negara lain. Eksistensi Indonesia di kancah internasionalpun mulai menurun.

Untuk mengembalikan keadaan Indonesia seperti sedia kala maka dibutuhkan sebuah media diplomasi yang ampuh. Bagi sebuah negara, diplomasi bertujuan sebagai pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan erat dengan negara-negara yang sehaluan dan menetralisir negara yang berhaluan. Tujuan dari sebuah diplomasi selain keamanan nasional juga terdapat pertimbangan yang lain yaitu peningkatan prestise nasional, perlindungan warga negara sendiri di negara lain dan memperoleh persahabatan.[1] Salah satu jalan adalah dengan pengiriman pasukan perdamaian dibawah naungan PBB ke negara lain. Pasukan perdamaian dari

---

[1] S.L. Roy, "Diplomasi" terjemahan Harsono dan Mirnawati, CV. Rajawali, Jakarta 1991, hal. 6

Indonesia atau disebut Pasukan Garuda secara intens dikirim ke daerah-daerah yang terjadi konflik sebagai misi kemanusian. Pasukan Garuda ini pertama kali dibentuk dan dikirim pada tahun 1957 untuk bertugas di Mesir.[2]

Setelah beberapa kali mengirimkan Pasukan Garuda ke negara lain baru ketika terjadi invasi Israel ke Lebanon pengiriman pasukan ini mendapatkan perhatian yang cukup besar baik dari masyarakat Indonesia, eksekutif maupun legislatif. Banyak isu yang muncul seiring keinginan pemerintah Indonesia mengirim Pasukan Garuda ke Lebanon. Walupun pengiriman Pasukan Garuda sebagai misi perdamaian sesuai dengan dasar politik luar negeri Indonesia yang tertuang dalam UUD 45 dan mendapat dukungan yang cukup besar dari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tetapi banyaknya hambatan dan dukungan seputar pengiriman tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Pemerintah Indonesia tentu memilki alasan-alasan dan kepentingan-kepentingan tertentu dibalik pengiriman Pasukan Garuda kali ini.

Alasan-alasan dan kepentingan-kepentingan inilah yang telah menimbulkan penulis tertarik untuk mengangkat judul: **"Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Mengirim Pasukan Garuda XXIII Ke Lebanon".**

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi berjudul: "Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Mengirim Pasukan Garuda XXIII Ke Lebanon" adalah:

---

[2] http://www.wikipedia.com "*Kontingen Garuda*", ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm

1. Membahas secara ilmiah fenomena Indonesia yang menarik bagi semua yang menaruh minat terhadap studi Hubungan Internasional, terutama persoalan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia.
2. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah terhadap realitas yang ada, sehingga dapat mendiskripsikan, menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki pengaruh yang cukup kuat di kawasan ini. Dari sisi sejarah dapat dilihat bahwa sejak memerdekakan diri tahun 1945 telah mampu menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lain. Kemerdekaan yang diperjuangkan sendiri oleh Bangsa Indonesia menjadi acuan bahwa Bangsa Indonesia memilki potensi yang cukup untuk menjadi sebuah negara besar. Kiprah politik Indonesia didunia internasional sangat diperhitungkan. Hal ini tidak lain dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para *founding fathers* bangsa ini. Usaha tersebut tidak selesai ketika proklamasi dikumandangkan tetapi secara intens terus dilakukan ketika awal-awal kemerdekaan. Sebagai negara Indonesia memerlukan kedaulatan yang

undang dan melaksanakanya dengan semua cara yang tersedia. Untuk menjamin kedaulatan sebuah negara maka diperlukan pengakuan baik dari dalam (*internal sovereignt*) maupun dari negara lain (*external sovereignty*).

Untuk mendukung keberadaan Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat maka dibutuhkan sebuah undang-undang sebagai sebuah dasar negara. Dasar negara yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah acuan dalam bernegara. Begitu juga pokok-pokok politik luar negeri selalu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan UUD 45. Hal ini dimaksudkan agar ideologi, strategi dan haluan politik luar negeri Indonesia tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan konstitusional yang digariskan pada awal berdirinya Bangsa Indonesia. Sejalan dengan pengertian ini, secara konstitusional politik luar negeri Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama dan keempat Mukadimah atau pembukaan UUD 45 merupakan inti landasan konstitusional tersebut. Dalam alinea pertama secara jelas dinyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah anti penjajahan, anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sedangkan inti alinea keempat mewajibkan Indonesia berperan aktif didunia internasional dalam upaya mencapai ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[3]

Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia tersebut maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mengimplementasikan peraturan tersebut ke fora internasional. Salah satu wujud nyata dari hal tersebut adalah keikutsertaan

---

[3] Diwandi M Anwar, *"Diktat Politik Luar Negeri Indonesia"*, UMY, Yogyakarta, hal. 38

Indonesia ke dalam PBB dan organisasi internasional lainnya. Tetapi eksistensi Indonesia dalam politik internasional sangat terlihat saat Indonesia menjadi salah satu pencetus didirikannya organisasi Gerakan Non Blok pada era Perang Dingin. Hal ini merupakan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas aktif.

Usaha-usaha untuk tetap menjaga eksistensi Indonesia dalam dunia internasional yang terus dilakukan adalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian (*peace keeping*) di bawah PBB.

Kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia, melalui pengiriman pasukan pemelihara perdamaian PBB terus berlanjut hingga saat ini. Sejak pertama kali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Mesir tahun 1957 sudah beberapa kali Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda ke negara lain. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pasukan inilah yang dinilai dapat menjadi sebuah media diplomasi yang ampuh bagi Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada baik dari segi persenjataan maupun anggaran yang disebabkan minimnya anggaran di bidang militer, Pasukan Garuda bisa memberikan angin segar bagi keterpurukan Indonesia di bidang diplomasi dan bisa mengangkat posisi Indonesia sehingga mengakibatkan *bargaining position* Indonesia menjadi lebih kuat.

Ketika Israel memasuki wilayah Lebanon Selatan dengan alasan yang dijabarkan di sidang umum yaitu untuk melucuti semua senjata Hizbullah hidup

Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Aita al Chaab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Tindakan penangkapan ini, sejalan dengan rencana Hizbullah yang disebut sebagai Operasi *Truthful Promise* ("Janji yang Jujur") yang bertujuan untuk membebaskan warga Lebanon yang ditawan Israel dengan melalui pertukaran tawanan. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang. Israel kemudian membalas dengan Operasi *Just Reward* ("Balasan yang Adil"), yang lalu namanya diubah menjadi Operasi *Change of Direction* ("Perubahan Arah"). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), blokade udara dan laut serta beberapa serangan kecil ke dalam wilayah Lebanon selatan oleh tentara darat IDF.[4]

PBB sebagai organisasi terbesar dunia mulai bereaksi dengan mengadakan sidang untuk membahas konflik Israel-Lebanon tetapi selalu gagal mengeluarkan resolusi yang disebabkan campur tangan Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel. Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan Israel ini merupakan sebuah langkah untuk menjaga stabilitas negaranya. Seperti yang kita ketahui setiap konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah selalu menghadirkan Israel sebagai salah satu pihak yang berkonflik. Sejak memerdekakan diri pada tahun 1948 negara yang menjadikan Tel Aviv sebagai ibu kotanya selalu menghadirkan

---

[4] http://www.wikipedia.com, "*Konflik Israel Lebanon 2006*", wikipedia Indonesia, 10/11/2006

ketegangan di kawasan Timur Tengah. Penolakan bangsa-bangsa Arab atas berdirinya Negara Israel di tanah Palestina telah memicu berbagai ketegangan.[5] Jaminan stabilitas keamanan inilah yang menyebabkan Amerika Serikat bersikeras untuk selalu menggagalkan draf yang telah disusun PBB.

Setelah mendapatkan tekanan yang cukup besar terutama dari negara-negara Islam barulah PBB mengeluarkan resolusi no 1701 yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk segera melaksanakan gencatan senjata dan masuknya pasukan tentara penjaga perdamaian internasional di bawah kendali PBB. Serta meminta Israel dan Hizbullah untuk segera menghentikan perang.[6]

Resolusi ini ditanggapi oleh berbagai negara dengan baik terutama poin yang menyebutkan penghentian konflik dan diteruskan dengan masuknya pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB ke wilayah Lebanon Selatan. Banyak negara yang bersedia mengirimkan pasukan mereka untuk misi perdamaian di Lebanon. Perancis, Italia, Indonesia, Denmark, Malaysia, Bangladesh, Jerman, Nepal dan Indonesia adalah negara-negara yang berjanji mengirimkan pasukannya ke Lebanon di bawah bendera UNIFIL (*United Nation Interim Force in Lebanon*). Namun pasukan yang diperkirakan nantinya berjumlah 15.000 personil tersebut sangat sulit untuk dibentuk. Negara-nagara Uni Eropa enggan mengirimkan pasukannya dengan jumlah besar dikarenakan aturan perlibatan dan peran pasukan UNIFIL belum jelas. Keinginan Sekjen PBB untuk menempatkan Perancis

[5] Sidik Jatmika, "*Politik Timur Tengah*", UMY, Yogyakarta, 2004, hal.188
[6] http://hnw.or.id/Kamis, 19/01/2006

sebagai pemimpin pasukan perdamaian ini tidak terwujud karena sedikitnya pasukan yang dikirim Perancis.

Dalam hal ini Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas Muslim merasa memiliki ikatan batin dengan rakyat Lebanon. Perasaan senasib inilah yang kemudian membuat rakyat Indonesia merasa prihatin dengan apa yang menimpa saudara mereka di Lebanon. Sentimen anti Israel dan Amerika muncul kembali di beberapa daerah di Indonesia. Aksi-aksi demo mulai digelar oleh berbagai pihak untuk mengecam tindakan Israel tersebut. Kantor PBB dan gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan tidak luput dari aksi demo yang dilakukan baik oleh ormas Islam maupun mahasiswa.[7] Pada umumnya mereka menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar segera menghentikan perang agar korban warga sipil tidak terus berjatuhan. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin berangkat ke Lebanon untuk jihad melawan Israel. Bahkan ada politikus anggota PKS yang tergabung didalam Komite Nasional untuk Rakyat Palestina langsung berangkat ke Lebanon untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga Lebanon dan Palestina yang menjadi korban invasi Israel.[8] Pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Melalui juru bicara kepresidenan, Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala negara Indonesia mengecam tindakan Israel memasuki wilayah Lebanon dan mendesak PBB untuk segera memberikan sanksi kepada Israel.

---

[7] Media Indonesia, Dukungan, Jum'at, 04 Agustus 2006

[8] http://www.tempointeraktif.com "*Politikus PKS ke Lebanon dan Palestina*" Sabtu 12/08/2006

Indonesia menjadi komponennya dan anggaran yang perlu dikeluarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Walaupun pada umumnya rakyat Indonesia menyetujui pengiriman Pasukan Garuda tersebut tetapi ada juga pihak-pihak yang merasa pengiriman Pasukan Garuda ke Lebanon adalah suatu kebijakan pemerintah yang tidak perlu. Dengan alasan dana yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan cukup besar apabila dibandingkan dengan keadaan ekonomi Indonesia. Bangsa Indonesia lebih membutuhkan dana tersebut untuk membangun kembali Indonesia setelah beberapa kali terkena bencana alam. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi persenjataan yang dimiliki oleh TNI. Walaupun embargo senjata yang diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia telah dicabut tetapi hal itu tidak menjamin adanya perubahan yang drastis terhadap sistem persenjataan yang dimiliki oleh TNI. Anggaran yang kurang dari 1% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk anggaran belanja pertahanan Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab buruknya sistem persenjataan yang dimiliki TNI. Hal ini memunculkan asumsi bahwa TNI untuk saat ini belum siap untuk melaksanakan sebuah misi yang besar.

Dilain pihak PBB sebagai fasilitator pasukan perdamaian walaupun secara langsung meminta bantuan Indonesia tetapi beberapa kali sempat menunda keberangkatan Pasukan Garuda XXIII ke Lebanon. Penundaan keberangkatan ini berkaitan dengan beberapa faktor diantaranya lambatnya penempatan pasukan

harus dikeluarkan negara pengirim kontingen ke dalam misi UNIFIL. PBB akan membayar kembali semua pengeluaran. Hanya saja ini memerlukan waktu sekitar 60 hari kerja. Sedangkan dana yang tidak dibayar PBB adalah pembelian alat persenjataan di luar yang terdapat dalam daftar persenjataan organik.[10] Selain itu pasukan ini juga mendapatkan bantuan Amerika Serikat dalam hal transportasi sebesar Rp 44,5 milyar. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ini merupakan wujud dari kedekataan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat.

Dengan kebijakan pemerintah untuk mengirimkan Pasukan Garuda ke Lebanon yang juga mengeluarkan dana tidak sedikit ini banyak menuai kritik. Walaupun pemerintah dianggap relatif mampu untuk mengirimkan pasukan namun alokasi dana dari pemerintah untuk pengiriman pasukan ini dirasakan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian Indonesia yang masih belum stabil dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan dana yang cukup besar untuk biaya rehabilitasi pasca bencana. Tapi mengapa pemerintah berani mengirimkan pasukan dengan jumlah besar yang pada akhirnya membutuhkan dana yang cukup besar pula daripada mengalokasikan dana tersebut ke pos-pos rehabilitasi bencana? Selain itu Bangsa Indonesia masih membutuhkan TNI untuk mengamankan integritas wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

---

[10] http://www.antaranews.com, *"DPR Resmi Resmi Pengiriman Misi Militer RI ke Lebanon"*

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah, yaitu:

"Apakah yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon"

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori Pembuat Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin).

Kebijakan yang diambil oleh suatu negara senantiasa selalu diabdikan untuk kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu untuk menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mengirimkan Pasukan Garuda XXIII ke Lebanon pasca invasi Israel, penulis menggunakan pendekatan dengan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin. Dalam buku yang berjudul *"Introduction to International Relation"*. Teori ini dipandang relevan digunakan karena untuk melaksanakan sebuah kebijakan harus melalui sebuah proses pembuatan keputusan.

Teori Pembuatan Keputusan merupakan sebuah model untuk membantu menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi. Teori ini sendiri berasumsi mengapa suatu kebijakan dapat dibuat oleh manusia. Keputusan juga merupakan sesuatu hal yang penting dalam sebuah proses politik, dalam batasan David

Pembuatan Keputusan dipengaruhi oleh beberapa kategori seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin:

"Foreign policy act may be viewed as the result of three broad categories of consideration. The first is domestic politics within the foreign policy decision maker's of the state. The second is the economic and military capability of his state. The third is international context the particular position in which his state finds".[11]

Dari ketiga kategori diatas, adanya interaksi satu sama lain sehingga dapat menghasilkan kebijakan Luar Negeri. Dapat digambarkan sebagai berikut :

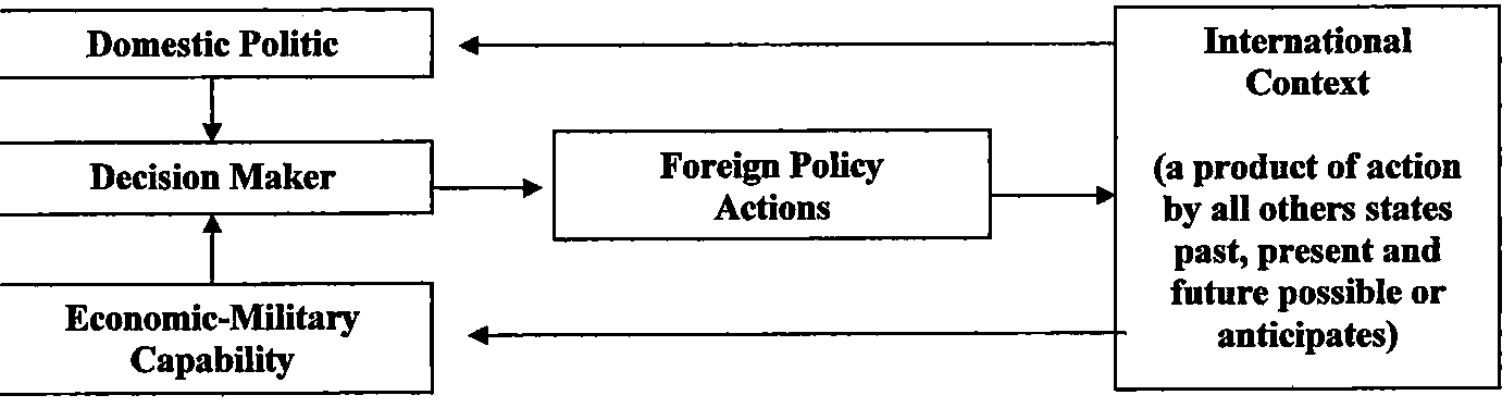

Sumber : William D. Caplin *"Introduction to International Relation"*, New York, 1970, hal. 10

Sesuai dengan teori kebijakan luar negeri diatas kebijakan pemerintah untuk mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon dipengaruhi oleh:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Dalam sebuah sistem politik banyaknya tuntutan dan dukungan yang bisa kita kategorikan ke dalam sebuah input, dalam suatu sistem politik sangat mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan. Input-input yang berupa dukungan dan tuntutan inilah yang nantinya akan membentuk kondisi politik dalam negeri suatu negara. Kondisi politik dalam negeri inilah

[11] William D. Coplin *"Introduction to International Relation"*, New York, 1997, hal. 10

yang akan sangat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Bagaimanakah kondisi masyarakat terhadap suatu isu politik yang beredar apakah ada tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri (*domesitic politics*) yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Adanya dukungan dari sebagian besar elemen masyarakat Indonesia terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dibawah PBB di Lebanon. Dukungan dari tokoh-tokoh nasional agar Pasukan Garuda segera diterbangkan ke Lebanon untuk mengatasi konflik Lebanon dan Israel mulai bermunculan. Selain itu pengiriman Pasukan Garuda XXIII sebagai realisasi dari dasar politik luar negeri Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

2. Decision Maker

Dalam politik internasional, meski negara sebagai aktor pelaku, namun manusia dengan peran sebagai pembuat keputusan melakukan aksi dan reaksi. Manusia bukan satuan yang abstrak yang biasa disebut negara, ia menetapkan dan memainkan konsep kepentingan nasional, merencanakan strategi, memaknakan issue, membuat keputusan untuk bertindak serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Pembuat keputusan di dalam politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bangsa. Pada kebanyakan negara, pimpinan

pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.[13]

Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kunjung membaik pasca krisis moneter 1997 dianggap sebagian orang sebagai sebuah masalah yang harus segera diatasi. Kalau keadaan perekonomian tidak kunjung membaik akan berimbas kepada sektor-sektor vital lainnya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Berbagai program ekonomi digalakkan untuk menambah jumlah kas negara. Pencabutan subsidi dari sektor-sektor yang dirasa memberatkan pemerintah secara bertahap dicabut. Program pemerintah ini dirasakan cukup untuk menambal kebocoran kas negara. Walaupun belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat tetapi perekonomian Indonesia dirasa memadai untuk mengirimkan sebuah pasukan dalam misi perdamaian.

Dari segi kapabilitas militer, Indonesia memiliki jumlah pasukan yang memadai dan mendapat pengakuan dunia internasional. Sedikitnya anggaran untuk bidang militer hanya dikarenakan pemerintah merasa kalau Indonesia terletak di kawasan yang pada umumnya jauh dari konflik antar negara. Sehingga

---

[13] Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional "Keadilan* [illegible] Mercedes Marbun, CV Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 115

mereka dengan beberapa kali mengirimkan Pasukan Garuda mereka dalam misi-misi kemanusiaan. Salah satu misi tersebut adalah pengiriman Pasukan Garuda XXIII ke Lebanon berdasarkan resolusi PBB 1701.

Selain itu situasi internasional yang masih dipengaruhi oleh peristiwa WTC yang berimplikasi dengan perang terhadap teroris ineternasional yang digalang Amerika Serikat berimbas kepada tuduhan Indonesia sebagai sarang teroris membuat kondisi dalam negeri Indonesia tidak menentu. Untuk menghapus anggapan itu dan membwa kembali citra baik Indonesia di mata internasional maka dibutuhkan diplomasi yang efektif. Salah satu jalannya adalah dengan terus berusaha untuk ikut serta dalam pencapaian perdamaian dunia.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Secara budaya dan agama, hubungan Indonesia dan Timur Tengah telah terjalin sejak lama dan saling menguntungkan. Mulanya hubungan ini hanya sebatas pada perdagangan, namun ketika Islam mulai dianut oleh masyarakat Indonesia maka hubungan tersebut semakin erat dan menempati posisi yang penting.[14] Negara-negara Timur Tengah yang kaya juga merupakan investor yang potensial bagi Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia investasi yang berasal dari Timur Tengah merupakan dana yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk perbaikan ekonomi negara. Perubahan arah politik Timur Tengah yang kemudian menarik dana investasi mereka dari Amerika Serikat menjadi hal yang perlu dicermati oleh Indonesia.

---

[14] [illegible] UMY, Yogyakarta, 2004, hal 221

Kebangkitan Cina juga tidak terlepas dari peran negara-negara Timur Tengah dalam investasi dana mereka.

F. Hipotesa

Berdasarkan atas latar belakang dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis dapat mengambil suatu hipotesa bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan Pasukan Garuda XXIII ke Lebanon dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Adanya dukungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengirimkan Pasukan Garuda ke Lebanon.
- Pengiriman Pasukan Garuda XXIII ke Lebanon mendapatkan dukungan penuh dari elit baik eksekutif maupun legislatif.
- Keadaan perekonomian dan militer Indonesia yang relatif mampu untuk mengirimkan pasukan perdamaian.
- Untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia dan penegakkan HAM.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) yaitu menerapkan pola-pola, pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, laporan media massa dan sumber-sumber yang relevan lainnya

termasuk data-data yang diperoleh dari website yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori / konsep yang tepat, sehingga di dapat analisa yang akurat atas permasalahan yang ada.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam bahan analisis, maka diperlukan pembatasan dalam penulisan ini. Penelitian ini akan memfokuskan pada pengiriman Pasukan Garuda ke Lebanon dengan mengambil studi kasus agresi militer yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Lebanon. Namun ada kemungkinan penulis sedikit menyinggung masalah diluar kurun waktu tersebut jika dianggap perlu dan relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, perlu adanya uraian sistematika penulisan untuk memudahkan menelusuri akar pemikiran dan analisa penulis, penulisan ini dibagi ke dalam lima bab seperti berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Penolakkan Indonesia atas agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon.

Bab III Menjelaskan secara umum gambaran mengenai politik luar negeri Indonesia dari dasar, sejarah dan politik luar negeri Indonesia saat ini dan gambaran mengenai militer Indonesia.

Bab IV Menjelaskan latar belakang pengiriman Pasukan Garuda XXIII ke Lebanon (pembuktian hipotesa).

Bab V Kesimpulan, berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

ancaman dari luar relatif kecil. Dicabutnya embargo senjata Amerika Serikat terhadap Indonesia membawa angin segar bagi sistem persenjataan yang dimiliki TNI. Dengan kondisi seperti itu militer Indonesia berusaha untuk tampil kedunia internasional sebagai duta perdamaian yang diharapkan dapat merubah citra buruk Indonesia di mata internasional.

4. Situasi dan Kondisi Internasional

Pengkajian tentang perilaku suatu negara juga difokuskan pada konteks internasional yang mempengaruhinya. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara ini akan membuat sebuah kebijakan. Situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan pertimbangan bagi *decision maker* dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu bangsa.

Dari segi situasi dan kondisi internasional, pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Lebanon ditujukan untuk mengatasi kritik-kritik yang diterima oleh militer Indonesia atas tindakannya yang dianggap melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua. Selama ini Indonesia mendapatkan kritik dari dunia internasional tentang pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di beberapa daerah yang dianggap rawan konflik. Bahkan karena tuduhan tersebut Amerika Serikat sempat memberikan embargo senjata kepada Indonesia. Setelah embargo senjata dihapus oleh Amerika Serikat dengan berbagai syarat yang salah satunya berhubungan dengan HAM, Indonesia berusaha memperbaiki citra militer